



A-N-T-I

ALIANSA NASIONAL TIMOR-LESTE BA TRIBUNÁL INTERNASIONAL

Sekretáriu Temporáriu: La'o Hamutuk,
Instituto Timor-Leste ba Analiza no Monitorizasaun ba Dezenvolvimentu
Rua dos Martires da Patria, Beborá, Dili, Timor-Leste
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste
Tel: +670-3321040 or +67077289241 or 77367518 / 77179655
e-mail: lanarra.del@gmail.com or atino@laohamutuk.org
Website: www.laohamutuk.org or www.jsmp.tl or www.haktl.org

Pernyataan Bersama

Peringatan Pembantaian Masal Santa Kruz, November 1991-2013

Kebenaran dan Keadilan adalah dasar untuk pengembangan demokrasi di Timor-Leste

Hari ini, bangsa Timor-Leste merayakan peringatan ke 22 Pembantaian Masal Santa Kruz, yang merupakan momen penting dalam keberhasilan perjuangan kemerdekaan Timor-Leste. Hari ini membangunkan kembali perhatian masyarakat internasional terhadap kejahatan pendudukan illegal di Timor-Leste dan budaya kekebalan hukum yang diterapkan. Dalam pembantaian masal 1991, tentara Indonesia dengan brutal menembakkan senjata-senjata mereka langsung ke para pemuda yang meletakkan karangan-karangan bunga dengan damai di makam Sebastião Gomes, di Kuburan Santa Kruz.

Tindakan kejam tentara Indonesia ini melanggar hak asasi manusia (HAM) internasional dan hukum kemanusiaan. Ini karena tentara Indonesia telah dengan sistematis membantai rakyat sipil di seluruh penjuru Timor-Leste, termasuk pembantaian memilukan di Santa Kruz. Pemerintah Indonesia selalu mencoba menyembunyikan kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan ini dari dunia, namun pembantaian Santa Kruz sudah mengekspos kekejaman dari militer Indonesia di mata dunia.

Sesudah pembantaian masal ini, tentara-tentara Indonesia membuang banyak mayat dalam kuburan-kuburan tak dikenal, dan menangkapi banyak orang yang tidak pernah terlihat lagi.

Sejak kemerdekaannya, Timor-Leste, bersama Indonesia, telah menunjukkan kemauan politik untuk mengutamakan penguatan hubungan bilateral dan mengesampingkan masalah-masalah keadilan, terutama kejahatan-kejahatan berat dari masa lalu. Pada tahun 2005, ketika Perdana Menteri Xanana Gusmão yang menjabat saat itu memeluk penjahat perang, Wiranto di Bali, Indonesia, dia menunjukkan kenyataan ini, yang diperkuat oleh mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri yang memeluk penjahat perang lainnya, Prabowo, di Jakarta awal tahun ini.

Meskipun demikian, Negara dan Penduduk Timor-Leste belum dapat meyakinkan para penjahat ini untuk menunjukkan dimana mereka menyembunyikan tulang-tulang orang-orang yang dibantai; juga para pelaku pun belum mengakui perbuatan mereka.

Beberapa kejahatan berat yang dilakukan tentara Indonesia selama 24 tahun pendudukan Timor-Leste yang telah dibawa ke proses-proses judicial, seperti Panel Khusus PBB untuk Kejahatan Berat di Dili dan Pengadilan Ad-Hoc HAM di Jakarta. Namun demikian, proses-proses ini gagal untuk

menuntut pertanggungjawaban para penjahat perang Indonesia, dan ANTI menganggap proses-proses ini sebagai formalitas untuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan berat masa lalu, bukannya kenyataan yang mau disembunyikan.

Korban yang selamat dan penggiat HAM di Timor-Leste dan negara-negara lainnya terus menuntut bahwa para penjahat perang diadili, terutama melalui pengadilan internasional, karena konsekuensi dari impunitas telah muncul di Indonesia dan Timor-Leste. Tentara-tentara Indonesia terus melakukan kejahatan-kejahatan serupa di Papua Barat dan tempat-tempat lain, dan orang-orang sering “menghilang”. Pelaku-pelaku kejahatan militer tidak takut pertanggungjawaban pidana; pada kenyataannya, mereka dinaikkan jabatan. Di Timor-Leste, para pemimpin kita hanya menurut apa yang orang-orang besar mau, bukannya apa yang diatur hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dan keprihatinan di atas, ANTI menyampaikan tuntutan-tuntutan berikut ini pada peringatan pembantaian masal Santa Kruz:

1. Dengan suara lantang, ANTI terus menuntut komunitas internasional untuk tidak meninggalkan tanggung jawab mereka untuk mengadili kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh militer Indonesia selama pendudukan ilegalnya, karena dampak-dampak dari kekebalan hukum terus menghantui masyarakat Indonesia dan Timor-Leste.
2. ANTI memohon pada masyarakat internasional untuk membantu masyarakat Indonesia dan Timor-Leste untuk menciptakan mekanisme peradilan yang dapat dipercaya sehingga mereka dapat mengakhiri kelaziman budaya impunitas.
3. ANTI meminta perhatian negara-negara utama, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Australia, yang telah mendukung rejim militer Soeharto, dan pendudukan ilegalnya di Timor-Leste dari 1975 sampai 1999. Khususnya, melalui program-program donatur, kita meminta mereka memberikan prioritas kepada korban-korban dan keluarga mereka sebagai kelompok khusus yang memerlukan dukungan dan sangat berhak mendapat bagian dari manfaat-manfaat pembangunan Timor-Leste.
4. ANTI juga meminta bahwa perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga internasional yang mengeruk keuntungan dari penjualan senjata melalui pendudukan di Timor-Leste, khususnya mereka yang telah menyediakan material-material yang dipakai di Timor-Leste, harus memberikan ganti rugi melalui dana kemanusiaan untuk reparasi korban pelanggaran-pelanggaran HAM.
5. ANTI menuntut semua Anggota-Anggota PBB untuk menolak mengeluarkan visa bagi pejabat-pejabat militer, yang saat ini dan mantan, yang nama-nama disebut dalam laporan *Chega*, karena kejahatan yang telah dilakukan atau bertanggung jawab karena memberikan perintah atas kejahatan-kejahatan tersebut. Dengan demikian, kami juga menuntut agar mereka dihukum, misalnya dengan menghentikan akses rekening bank mereka sampai ada pembuktian independen yang mengembalikan kredibilitas dan menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Kami sangat kecewa bahwa Wiranto sebagai tertuduh penjahat perang bebas untuk berpergian ke beberapa negara, termasuk berbicara dalam seminar di Cina pada awal 2012.
6. ANTI menuntut bahwa Pemerintah Timor-Leste meratifikasi Konvensi Internasional Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap Semua Orang Dari Tindak Penghilangan Secara Paksa karena ANTI percaya bahwa Timor-Leste dan Indonesia dapat memakai mekanisme ini untuk mencari semua orang yang dihilangkan semasa perang,

termasuk banyak orang sipil yang kematiannya dianggap sebagai tanggung jawab tentara Indonesia dalam pembantaian masa Santa Cruz 1991.

7. ANTI juga meminta institusi-institusi pemerintah Timor-Leste, khususnya Sekretaris Negara Urusan Veteran dan Kementerian Solidaritas Sosial, untuk mendukung dan memudahkan keluarga-keluarga yang saat ini masih sedang mencari jasad-jasad dari orang-orang yang mereka cintai supaya dapat dimakamkan di tempat yang semestinya, seperti taman pemakaman yang telah disediakan oleh Pemerintah Timor-Leste.

Akhirnya, ANTI juga meminta agar semua pihak (lembaga-lembaga keagamaan, LSM, akademisi dan seluruh masyarakat) untuk mengoordinasikan upaya-upaya untuk membangun gerakan pencarian orang hilang untuk mendorong pemerintah dan Parlemen Nasional agar mereka menyadari bahwa masalah ini sangat penting dan terus menjadi keprihatinan dari keluarga dan melanggar hak akan kebenaran. Melalui hal ini, kita dapat mencapai perdamaian dan rekonsiliasi untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Hidup Semangat 12 November 1991
Hidup Pengadilan Internasional
Hidup Keadilan

Dili, 12 November 2013

Anggota-anggota ANTI:

1. The National Victims' Association of the Political Conflict 1974-1999 (Asosiasun Vítima Konfliktu Politiku 74-99)
2. The HAK Association (Asosiasaun HAK)
3. Committee of 12th November (Komite 12 de Novembru)
4. JSMP (Judicial System Monitoring Program)
5. ACbit (*Asosiasaun Chega ba Ita*)
6. AJAR (Asia Justice and Rights) Timor-Leste
7. Secretariat of the NGO Forum (Sekretáriadu FONGTIL)
8. Lao Hamutuk (Walking Together)
9. Luta Hamutuk (Struggle Together)
10. OPVG (Organizasaun Popular da Vítima da Guerra/Popular Organization of Victims of War)
11. FTM (Forum Tau Matan/Forum for Monitoring)
12. KSI (Kdadalak Soru mutuk Institute)
13. FOKUPERS (Women's Organization)
14. KBH (Knua Buka Hatene/Home for Searching Knowledge)
15. Judicial System Monitoring Program (JSMP)
16. CDI (Community Development Interest)
17. Front Mahasiswa Timor-Leste (FMTL)
18. Institute Edukasaun Popular (IEP)
19. Klibur Solidariedade
20. Mata Dalam Institute (MDI)
21. Ita ba Paz